



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Reses V Tahun Sidang 2023-2024
(12 Juli – 15 Agustus 2024)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

f 27/8/24

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	3
C. FUNGSI PENGAWASAN	3
KOMISI III	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	5
C. FUNGSI PENGAWASAN	5
KOMISI IV	10
A. FUNGSI LEGISLASI	10
B. FUNGSI ANGGARAN	10
C. FUNGSI PENGAWASAN	10

KOMISI V	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
KOMISI VI	14
A. FUNGSI LEGISLASI	14
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	14
KOMISI VII	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	16
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
KOMISI VIII	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21

KOMISI IX	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI X	23
A. FUNGSI LEGISLASI	23
B. FUNGSI ANGGARAN	23
C. FUNGSI PENGAWASAN	23
KOMISI XI	27
A. FUNGSI LEGISLASI	27
B. FUNGSI ANGGARAN	27
C. FUNGSI PENGAWASAN	27
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	28
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	36
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	37

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	TNI	1.Kodam V/Brawijaya; 2. Kodam IX/Udayana; 3.Kodam VI//Mulawarman. Dilaksanakan pada 15 – 19 Juli 2024.	Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke daerah sebagai berikut: 1. Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kodam V/Brawijaya Tema: Kesiapan Kodam V/Brawijaya dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman, termasuk pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur. 2. Kota Denpasar, Provinsi Bali Obyek Kodam IX Udayana Tema: Kesiapan Kodam IX/Udayana dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman, termasuk pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bali. 3. Kota Balikpapan (Ibu Kota Negara), Provinsi Kalimantan Timur Obyek Kodam VI/Mulawarman Tema: Kesiapan Kodam VI/Mulawarman dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman, termasuk pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur.	
2.	KEMLU RI	1. KBRI Kuala Lumpur; 2. KBRI Bangkok;	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam rangka Pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. KBRI Singapura. Dilaksanakan pada 9 – 15 Agustus 2024.	terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan serta untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, dan untuk memberikan penguatan Diplomasi Parlemen terhadap pelaksanaan Politik Luar Negeri RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Tanggal 16 – 20 Juni 2024.	Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Kantah Kabupaten Gianyar, Kantah Kabupaten Badung, dan Kantah Kota Denpasar.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penyusunan RUU tentang Penyadapan	---	Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan masukan Anggota Komisi III DPR RI.	RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme (TPPT)	---	Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 2023.	Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3.	Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER)	---	Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang Narkotika</i>)	---	Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk dipelajari.	
5.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang Mahkamah Konstitusi</i>)	Pengambilan Keputusan Tk I RUU tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Mei 2024.	Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menkopolkam dan Menkumham dalam hal ini diwakilkan oleh Dirjen PP Kemenkumham dengan agenda Pengambilan Keputusan Tk. I pada tanggal 13 Mei 2024, dan memutuskan Pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna. Saat ini Komisi III DPR RI masih menunggu penjadwalan Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk II RUU tentang Mahkamah Konstitusi di Rapat Paripurna.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepolisian Daerah 2. Kejaksaan Tinggi 3. Kanwil Kemenkumham 4. BNN Provinsi	Sesuai Keputusan Rapat Intern tanggal 14 Mei 2024, Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. 3 (tiga) Peradilan Tingkat Banding dan Pertama (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara)	Reses MP V TS 2023-2024 ke Provinsi: 1. Kalimantan Tengah, tanggal 12 s.d. 16 Juli 2024; 2. DI Yogyakarta, tanggal 29 Juli sd 2 Agustus 2024; dan 3. Kepulauan Riau, tanggal 31 Juli sd 4 Agustus 2024.		
2.	1. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles Amerika Serikat 2. Atase Imigrasi Republik Indonesia di Los Angeles Amerika Serikat 3. <i>United States Homeland Security</i>	Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerika Serikat (Los Angeles) pada tanggal 17 sd 23 Juli 2024.	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI ke Negara Amerika Serikat dalam rangka mencari informasi, bahan dan data, baik berupa masukan maupun perbandingan mengenai permasalahan keimigrasian, sehingga Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pembahasan hal tersebut.	
3.	Keluarga Alm. Dini Sera Afrianti	RDPU Komisi III DPR RI dengan Keluarga Almrh. Dini Sera Afrianti dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 membahas: Kasus Pidana atas nama Dini diwilayah Kota Surabaya dan terdakwa di vonis bebas.	Permasalahan kasus pidana di wilayah Kota Surabaya yang membebaskan si terdakwa (Sdr. Gregorius Ronald Tannur) dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu agar Ronald dijatuhi hukuman 12 Tahun penjara dan membayar restitusi bagi keluarga korban sebesar Rp.263,6 juta. Kuasa Hukum Keluarga Alm. Dini menjelaskan : 1. Poin pertimbangan hakim vonis bebas Ronald Tannur yaitu korban alm. Dini dinilai hakim meninggal akibat minuman beralkohol. 2. Adanya beberapa fakta atas kejadian di <i>Blackhole</i> KTV dan di Apartemen Orchard.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Ada otopsi dan hasil visum dari Dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H., yaitu pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan tambahan, serta kesimpulan visum et repertum No. KF.23.0465 yaitu bahwa sebab kematian korban alm Dini karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.</p> <p>Rekomendasi Komisi III DPR RI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim (Ketua Majelis: Erintuah Damanik, Anggota: Mangapul, Heru Hanindyo) yang termasuk dalam Majelis Hakim terkait perkara Alm. Dini Sera Afriyanti (No. 454/PID.B/2024/PN SBY) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengajukan Kasasi dengan memori kasasi yang kuat sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengajukan pencekalan terhadap Saudara Gregorius Ronald Tannur kepada Kemenkumham sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Komisi III DPR RI mewajibkan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap Keluarga Korban dan Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 	
4.	Keluarga Alm. Afif Maulana dan Koalisi Advokat Anti Penyiksaan.	RDPU Komisi III DPR RI dengan keluarga Alm. Afif Maulana yang didampingi oleh Koalisi Advokat Anti Penyiksaan (LBH Padang, KontraS,	Dugaan tindak pidana penganiayaan dan penyiksaan terhadap anak di Kota Padang yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian sekaligus mendorong upaya ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah almarhum Afif Maulana.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>YLBHI, dan PBHI Nasional) pada tanggal 5 Agustus 2024 membahas: Permohonan ekshumasi & autopsi ulang Alm. Afif Maulana</p>	<p>Dalam RDPU tersebut, hadir pula personil dari Polda Sumbar, yaitu Direktur Reskrim Polda Sumbar, Kabid Humas, Kabid Propam Polda Sumbar, Kapolresta Padang, Kabid Dokkes Polda Sumbar, Penyidik Polresta Padang, dan dokter Spesialis Forensik Polda Sumbar.</p> <p>Pihak Polda Sumbar memberikan keterangan mengenai permintaan keluarga almarhum Afif Maulana mengenai ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah Afis Maulana, dan Polda Sumbar sudah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Ketua Himpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia.</p> <p>Komisi III DPR RI meminta agar Polda Sumbar segera menyelesaikan kasus ini dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
5.	<p>1. Kakanwil BPN Prov. DKI Jakarta dan jajaran 2. Srie Melyani, S.H. dan Rekan, selaku Kuasa Hukum Noraini Bawazier</p>	<p>RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dan Srie Melyani dkk selaku kuasa hukum Noraini Bawazier, pada tanggal 8 Agustus 2024 membahas: Tindakan Eksekusi Pengosongan tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata No. 15 Menteng Jakpus, tanpa hak dan melawan hukum oleh PN Jakarta Pusat</p>	<p>Membahas mengenai hak atas tanah dan bangunan serta tindakan tanpa hak dan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Rekomendasi Komisi III DPR RI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa putusan No: 495/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST merupakan putusan yang tidak dapat dieksekusi (<i>non-executable</i>) karena terdapat pertentangan dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai pemilik tanah sedangkan Tergugat memiliki alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, sehingga Penetapan Eksekusi No. 90/2017.Eks tanggal 18 April 2022 bertentangan dengan hukum. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Komisi III DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan alas hak atau sertifikat kepemilikan baru karena proses ini masih dalam sengketa. 3. Komisi III DPR RI meminta Badan Peradilan (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk tidak melakukan eksekusi pengosongan karena putusan bermasalah. 4. Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak mendukung pengamanan rencana eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Pemerintah Provinsi Aceh; 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara; 3. FORKOPIMDA Kabupaten Aceh Tenggara; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Badan Pangan Nasional; 8. PT Pupuk Indonesia; 9. Dinas terkait di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tenggara; 10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Tenggara; 11. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupate Aceh Tenggara; 12. Distributor dan Kios Pupuk Subsidi;	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Aceh pada 15 Juli s.d 19 Juli 2024.	a. Meninjau dan Diskusi mengenai Pengembangan Balai Benih Ikan Lawe Bekung di Kabupaten Aceh Tenggara. b. Meninjau dan Diskusi mengenai “Strategi Konservasi dan Penelitian di Taman Nasional Gunung Leuser untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati,” melibatkan masyarakat lokal dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan di tengah ancaman deforestasi dan perubahan iklim di Stasiun Penelitian BBTNGL Kec. Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. c. Diskusi mengenai Ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar	

NO.	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	13. Masyarakat yang terdampak konflik Satwa Liar Gajah; dan 14. Pembudi Daya Ikan dan Kelompok Petani Ikan;		Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser di Setda Kabupaten Aceh Tenggara. d. Panen Raya Jagung dan Diskusi tentang Peningkatan Produktivitas serta Hilirisasi Jagung dan Padi di Lokasi Panen Raya Jagung di Kecamatan Babul Makmur.	
2.	a. Pemerintah Provinsi Riau; b. Pemerintah Kabupaten Pelalawan; c. Kementerian Pertanian; d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Badan Pangan Nasional; g. Perum Bulog; h. PT Pupuk Indonesia; i. <i>ID FOOD</i> ; j. <i> Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)</i> ; k. Dinas terkait di Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan; l. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau; dan m. Perwakilan Petani Sawit Rakyat.	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Riau pada 15 Juli s.d 19 Juli 2024.	a. Pertemuan dan Diskusi Membahas Upaya Pembangunan Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Membahas Permasalahan Penyelesaian Sawit Rakyat yang terbangun di dalam kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan, di Kantor Bupati Pelalawan. b. Peninjauan dan Diskusi Membahas Ketersediaan dan Harga Pangan Strategis di Provinsi Riau di Gudang Bulog Jadirejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. c. Pertemuan dan Diskusi mengenai Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta perizinan dan sertifikasi produk mutu ikan yang bernilai tambah berbasis pasar dalam negeri dan luar negeri (ekspor) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.	-
3.	a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; b. Pemerintah Kabupaten Mamuju; c. Kementerian Pertanian;	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke	a. Kunjungan dan Diskusi mengenai Gerakan Tanam Padi (mendukung Program Kementerian Pertanian terkait luas tambah	

NO.	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. PT Pupuk Indonesia (Persero); g. ID FOOD; h. PT Perikanan Indonesia; i. Dinas terkait di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju; j. Wakil Pegiat Pengolahan Sampah di Kab. Mamuju; dan k. Perwakilan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju.	Provinsi Sulawesi Barat pada 17 Juli s.d 21 Juli 2024.	tanam dan PAT) di Lokasi Gerakan Tanam Padi Kabupaten Mamuju. b. Diskusi mengenai: 1) Permasalahan Penangkapan Ikan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat; 2) Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju; dan 3) Permasalahan Perberasan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Mamuju. c. Kunjungan ke Tempat Pengumpulan Sampah Adi-Adi Kabupaten Mamuju dan Diskusi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian PUPR 2. (Irjen, Ditjen BM, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya , Ditjen Bikon) 3. Kementerian Perhubungan 4. (Ditjen Hubud, Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla) 5. BMKG 6. BNPP/ Basarnas 7. Kemendes PDTT 8. PT. AP Indonesia 9. LPPNPI (AirNav)	Kunres dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 Juli 2024.	Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali: 1. Kabupaten Tabanan; 2. Kabupaten Gianyar; 3. Kabupaten Badung.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian BUMN, PT. Aviasi Pariwisata Indonesia, PT. Hotel Indonesia Natour, PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC, PT. Pertamina Bina Medika, PT. Angkasa Pura Indonesia	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada tanggal 2-6 Agustus 2024.	Dalam rangka evaluasi pembangunan Kawasan ekonomi khusus (KEK) Kesehatan dan pariwisata serta sarana transportasi bagi sektor Pariwisata.	
2.	Kementerian BUMN, PT. Pertamina dan PT. PLN	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada tanggal 2-6 Agustus 2024.	Dalam rangka evaluasi terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan ketahanan energi.	
3.	Kementerian BUMN, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bang Tabungan Negara, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, PT. Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Jaminan Kredit Indonesia	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Tabanan, Provinsi Bali. Pada tanggal 2-6 Agustus 2024.	Dalam rangka evaluasi penyaluran KUR dan strategi pengembangan UMKM pasca berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit dari OJK.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Mind ID Trading Singapura, Pertamina Internasional Shipping Singapura, BNI Singapura, dan Bank Mandiri Singapura.	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VI DPR RI ke Negara Singapura. Pada tanggal 7 s. d 13 Agustus 2024.	Dalam rangka pengawasan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Singapura dan mengetahui aktivitas perdagangan komoditas timah yang merupakan salah satu komoditas barang tambang unggulan Indonesia.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur	Kunjungan kerja reses komisi VII dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Juli 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian RI untuk membangun ekosistem industri hilir seperti industri turunan katoda tembaga di Indonesia sehingga hilirisasi mineral dapat dilakukan dari hulu ke hilir.2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong PT Freeport Indonesia untuk mengoptimalkan <i>multiplier effect</i> dari smelter PT Freeport Indonesia di Gresik termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI telah mendapatkan data-data terkait prognosa kebutuhan BBM dan LPG 3 kg bersubsidi dan menaruh perhatian khusus terhadap adanya potensi <i>over quota</i> LPG 3 kg di Tahun 2024.4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mendalami kebutuhan BBM dan LPG 3 kg secara komprehensif dan meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk menyampaikan data-data terkait:	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi pendistribusian BBM dan LPG 3 kg di Semester I untuk masing-masing daerah. • Prognosa kebutuhan BBM dan LPG 3 kg di Semester II untuk masing-masing daerah. • Jumlah SPBE, agen dan pangkalan LPG 3 kg di masing-masing daerah. <p>5. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong Pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga, dan seluruh <i>stakeholders</i> terkait untuk terus meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian BBM dan LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran.</p>	
2.	Peninjauan <i>Green Hydrogen Plant</i> PLTU Paiton, Jawa Timur	Kunjungan kerja reses komisi VII dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Juli 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam rangka melakukan transisi energi pada PLN NP Paiton dari energi uap ke energi <i>biomassa</i> untuk sumber energi pembangkitnya. 2. Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI mengapresiasi PLN NP Paiton sebagai Pioneer implementasi <i>Green Hydrogen Plant</i> (GHP) pertama di Indonesia untuk sektor ketenagalistrikan. 3. Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI mendesak PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan <i>roll out Green Hydrogen Plant</i> (GHP) untuk 21 pembangkit lainnya di PLN Group. 4. Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI merekomendasikan PT PLN (Persero) untuk membuat <i>roadmap</i> transisi energi dalam mendukung target <i>Net Zero Emission</i> (NZE) di tahun 2060. 	
3.	Smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa,	Kunjungan kerja reses komisi VII dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kunker Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas pencapaian Pembangunan smelter tembaga dan fasilitas PMR 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	NTB	pada tanggal 15 s.d 19 Juli 2024.	<p>PT AMNT yang hingga saat ini secara kumulatif telah mencapai 95,50% dan telah selesai melakukan <i>mechanical completion</i> serta <i>commissioning</i> dibebberapa peralatan sebagai persiapan pengoperasian smelter yang direncanakan 31 desember 2024 dengan kapasitas produksi mencapai 60%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebelum dilakukan serah terima proyek, PT AMNT diminta membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan secara detil terkait kelayakan teknologi, mesin/peralatan yang akan digunakan untuk memastikan tingkat keandalan dan keamanan dalam pengoperasiannya, serta memastikan dilakukannya transfer teknologi dengan melibatkan tenaga kerja lokal yang berada disekitar wilayah operasi smelter. 3. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendorong adanya kerja sama antara Pemda dengan PT AMNT dan PT STM serta Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan <i>industry downstream</i> dengan memanfaatkan hasil produksi dari smelter termasuk Kerja sama dalam pengembangan infrastruktur penunjang lainnya. 4. PT AMNT merupakan salahsatu perusahaan pertambangan terintegrasi yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan transisi energi. Hal ini ditandai dengan dikembangkannya PLTS 26,8 MWp, PLTGU 450 MW berbahan LNG untuk mengurangi emisi karbon, adanya kegiatan penanaman pohon sebanyak 5 juta pohon untuk kegiatan reklamasi, rehabilitasi DAS dan program penanaman mangrove yang berkontribusi dalam menyerap CO₂ 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5. Mengingat bahwa penyelesaian Pembangunan smelter tembaga dan fasilitas PMR masih berlangsung, PT AMNT telah mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat kembali hingga 31 Desember 2024 berdasarkan Permen ESDM No 6 Tahun 2024. Rencana volume konsentrat yang diekspor pada periode juli – desember 2024 sebanyak 587.330 WMT.</p> <p>6. Mengingat masih adanya resistensi dimasyarakat terkait kegiatan pertambangan, maka PT STM diharapkan intens untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat (kabupaten bima dan kabupaten dompu), serta melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat mengisi ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT STM saat ini dan kedepannya</p> <p>7. Tim Kunker Komisi VII DPR RI sepakat dengan Pemerintah Daerah kabupaten Bima dan kabupaten dompu agar PT STM meningkatkan TKDN diantaranya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal.</p> <p>8. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendorong agar PT STM dapat segera meningkatkan kegiatannya menjadi operasi produksi sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal yang berada dilingkar tambang. Untuk itu Pemda (provinsi dan kabupaten) perlu mendukung dalam bentuk kemudahan perizinan yang dibutuhkan PT STM</p> <p>9. Tim Kunker Komisi VII DPR RI akan mengagendakan RDP dengan Dirjen Minerba KESDM terkait keberlanjutan</p>	

Masa Reses V Tahun Sidang 2023-2024
(12 Juli – 15 Agustus 2024)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024	Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah tanggal 15-19 Juli 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan. 2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. 3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap kesiapsiagaan bencana. 	
2.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	Melakukan kunjungan kerja ke Papua Nugini pada 29 Juli sampai 3 Agustus 2024.	Melakukan pertemuan tentang kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan: 1. Kota Manado, 2. Kota Bitung, 3. Kota Minahasa.	Kunjungan Kerja Reses Komsu IX DPR RI pada Senin s.d. Jumat, 15 s.d. 19 Juli 2024.	Kunjungan Kerja Reses Komsu IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja terkait: 1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI; 2. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan yang dibiayai APBN 3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI Provinsi Sulawesi Utara ke Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung 4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata		Komisi X sedang menunggu terbitnya Surat Presiden RI untuk membahas RUU tersebut.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses	Tanggal 12—16 Juli 2024 Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Banda Aceh.	Komisi X merekomendasikan, antara lain, sebagai berikut. Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mendata jumlah satuan pendidikan yang berdiri di atas bangunan wakaf dalam Dapodik dan mendata jumlah kebutuhan guru kelas dan tata usaha di tingkat SD, serta mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari implementasi PPDB sistem zonasi.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan terobosan pendampingan untuk mendukung Pemerintah Daerah yang belum memiliki Rencana Induk Pariwisata atau <i>blueprint</i> pariwisata, serta mendorong bersama K/L terkait untuk mendukung Pemerintah Kota dan Provinsi menyelenggarakan <i>side even</i> kepariwisataan dan ekraf dalam menyambut gelar PON XXI.</p> <p>Bidang Pemuda dan Olahraga Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora RI segera berkoordinasi dengan K/L terkait dan Pemda Kota Banda Aceh untuk menyusun strategi pemenuhan kebutuhan anggaran sebesar Rp276.322.812.756 (APBN) untuk kebutuhan dukungan bidang IT, kesehatan, kesekretariatan, konsumsi, peralatan, pertandingan, promosi pemasaran, sumber daya manusia, transportasi dan <i>venue</i>, serta mendesak kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi agar memberi dukungan penuh terhadap Kota Banda Aceh dalam memberikan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dengan optimalisasi berbagai kegiatan, dukungan anggaran, dan fasilitasi sarana prasarana.</p> <p>Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh melakukan terobosan pemberian bantuan penambahan koleksi pustaka dan mebeluer terkait persiapan penyelesaian pembangunan gedung layanan Perpustakaan Umum Kota Banda Aceh yang saat ini memasuki tahap II, serta mendorong Perpustakaan RI berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI bersama Pemprov Aceh dalam pemberian</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			bantuan program literasi bagi peserta didik PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan Pemda Kota Banda Aceh.	
2.	Kunjungan Kerja Reses	Tanggal 12—16 Juli 2024 Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh.	<p>Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk: (a) membantu Pemda Provinsi Aceh agar tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dengan menumpang di sekolah lain, karena kondisi tersebut memengaruhi psikologis siswa; (b) meningkatkan program afirmasi agar mengurangi angka anak putus sekolah di provinsi Aceh; (c) mendukung Pemda Aceh untuk menjadikan Makam Syekh Kuala sebagai destinasi wisata unggulan; (d) membantu pengembangan ISBI Aceh. 2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membantu dan mendukung Pemda Aceh dalam mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekraf guna mendukung pelaksanaan PON XXI 2024. 3. Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora RI berkoordinasi dengan KemenPUPR untuk membantu Pemda Aceh guna memastikan pembangunan <i>venue</i> dan sarana prasarana PON XXI yang saat ini (12 Juli 2024) rata-rata mencapai 75% dapat selesai sesuai target dan dapat digunakan untuk pelaksanaan PON XXI di Provinsi Aceh. 4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk mengoordinasikan dengan K/L lain terkait untuk membantu permasalahan kurangnya tenaga perpustakaan bersertifikasi, kurangnya koleksi bahan bacaan terbitan baru, kurangnya alat permainan edukatif, belum berfungsinya alat pendeteksi buku, dan kurangnya komputer. 	
3.	Kunjungan Kerja Reses	Tanggal 12—16 Juli 2024 Kunjungan Kerja Reses Komisi X	Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mempertimbangkan dan memenuhi usulan penambahan DAK Fisik bidang pendidikan untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada RAPBN TA 2025, mengingat banyak sekolah yang akan direhabilitasi. 2. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memenuhi usulan pengadaan DAK bidang pariwisata pada RAPBN TA 2025, mengingat Kabupaten Deli Serdang tidak memperoleh DAK pariwisata pada tahun sebelumnya, memiliki potensi wisata yang besar, serta merupakan daerah penyangga destinasi superprioritas Danau Toba. 3. Terkait bidang olahraga dan persiapan PON XXI di Aceh-Sumatera Utara, Komisi X DPR RI: <ol style="list-style-type: none"> a. mendesak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan Kompleks Sport City di Deli Serdang untuk memenuhi standar pembangunan <i>venue</i> olahraga, standar sarana-prasarana pendukung, selesai tepat waktu, dan tertib administrasi, dan tidak menimbulkan permasalahan hukum <i>pasca-event</i>; b. mendorong pemerintah daerah berkoordinasi, khususnya terkait persiapan <i>venue</i> olahraga yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yaitu rehabilitasi <i>venue</i> untuk cabang olahraga Kabaddi dan <i>venue</i> untuk Cabor Kriket. 4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk berkoordinasi dengan Perpustakaan RI, terkait usulan penambahan koleksi buku, kendaraan keliling, penambahan pustakawan, maupun sarpras pendukung lain, serta menginisiasi berbagai kegiatan literasi yang mengundang masyarakat untuk memanfaatkan Perpustakaan Kabupaten Deli Serdang. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Kunjungan kerja reses pada 5 s.d. 9 Agustus 2024.	Kunjungan Kerja Reses	
2.	Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Kunjungan kerja reses pada 5 s.d. 9 Agustus 2024.		
3.	Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Kunjungan kerja reses pada 5 s.d. 9 Agustus 2024.		

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Bilateral <i>Meeting</i> GKSB Fiji dengan Delegasi Parlemen Fiji dilaksanakan pada 26 Juli 2024.	<p>Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Fiji, Ongku P Hasibuan, mengadakan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Fiji di Jakarta. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dengan Fiji sebagai bagian dari visi <i>Pacific Elevation</i> untuk menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.</p> <p>Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan pentingnya penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah sebagai dasar dari visi tersebut. “Sebagai salah satu negara pemimpin di Kawasan Pasifik, Fiji adalah sahabat dan mitra penting bagi Indonesia untuk membangun kawasan ini,” ujarnya. “Oleh karena itu, kerja sama antara Indonesia dan Fiji yang telah terjalin dengan baik harus terus ditingkatkan,” ujarnya saat pertemuan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).</p> <p>Hubungan bilateral antara Indonesia dan Fiji telah terjalin selama 50 tahun, dan Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini. Pada bulan Juni tahun ini, Indonesia menunjukkan dukungan konkret dalam pembangunan sektor kesehatan di Fiji dengan memberikan hibah peralatan medis senilai FJD 428,000.</p> <p><i>Legislator</i> Dapil Sumatera Utara II ini juga menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan Fiji Indonesia <i>Friendship Association</i> yang bertujuan mempererat hubungan antar masyarakat di kedua negara. “Indonesia ingin kemitraan dengan Fiji dan negara-negara kawasan Pasifik menjadi kesempatan untuk membangun masa depan bersama melalui</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kerja sama yang didasari rasa saling percaya dan saling menghormati,” katanya.</p> <p>Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda dalam setiap bidang kerja sama yang dikembangkan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap bidang kerja sama yang kita kembangkan telah memperhatikan dan melibatkan kepentingan generasi muda,” tambahnya.</p>	
2.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan Duta Besar Rusia dilaksanakan pada 1 Agustus 2024.	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan (<i>courtesy call</i>) dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Mr. Sergei Gennadievich Tolchenov, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (1/8/2024). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI (F-PGerindra).</p> <p>Pertemuan tersebut membahas mengenai sejumlah isu strategis yang bertujuan memperkuat hubungan parlemen antara Indonesia dan Rusia. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Federasi Rusia menyampaikan undangan resmi untuk dari Ketua State Duma kepada Ketua DPR RI untuk berkunjung ke Moskow dalam waktu dekat, serta untuk menghadiri <i>Eurasian Women Forum</i> di St. Petersburg.</p> <p>Sejumlah topik lain yang turut menjadi pembahasan, diantaranya terkait perkembangan konflik global dan mengenai perdamaian dan stabilitas kawasan. Dubes Rusia juga memberikan apresiasi kepada Indonesia atas pertemuan produktif antara Presiden terpilih dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin. Pertemuan tersebut membahas berbagai topik penting seperti ketahanan pangan, energi, dan keamanan, yang menjadi konsentrasi utama Indonesia ke depan.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Putu Supadma Rudana (F-PD), serta</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Atase Kedutaan Besar Federasi Rusia Anton Tikhomirov dan Julia Tomskaya.	
3.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan CDA Georgia dilaksanakan pada 1 Agustus 2024.	<p>Agenda Pimpinan BKSAP DPR RI dilanjutkan dengan <i>courtesy call</i> dari Kedutaan Besar Georgia Mr. Tornike Nozadze di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (1/8/2024). Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin pertemuan dengan Mr. Tornike Nozadze, <i>Charge d’Affaires</i> (CDA), dan Ms. Shorena Duchidze, Deputi CDA, serta didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez (F-PDIP).</p> <p>Ketua BKSAP menjelaskan bahwa Parlemen Indonesia telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Georgia. Pihaknya juga menyambut baik keinginan Georgia untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia, tidak hanya di bidang politik tetapi juga ekonomi. Saat ini, Georgia juga merupakan negara observer di ASEAN <i>Inter-Parliamentary Assembly</i> (AIPA).</p> <p>Parlemen Indonesia menilai besarnya potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara, meskipun masih terdapat kendala dalam hal konektivitas. Sebagai bagian dari <i>One Belt One Road</i>, Georgia memiliki jalur kereta yang terhubung hingga Eropa. Pihaknya optimis akan ada peluang kerja sama di berbagai komoditas yang dibutuhkan kedua negara. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez.</p>	
4.	KSB - BKSAP	Audiensi Pimpinan BKSAP dengan GAPKI pada 1 Agustus 2024.	<p>Pimpinan BKSAP menerima audiensi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia pada hari Kamis (01/08/2024).</p> <p>Dalam kegiatan tersebut, BKSAP dan GAPKI membahas tantangan yang dihadapi oleh komoditas kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menyampaikan bahwa BKSAP akan terus menyuarkan kepentingan komoditas kelapa sawit dan perkebunan lainnya di berbagai forum parlemen internasional, serta mengupayakan pendekatan pendekatan kepada berbagai parlemen</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>negara sahabat untuk menyampaikan bahwa industri kelapa sawit dan komoditas perkebunan lainnya diolah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p> <p>Kedepannya kedua pihak akan terus berkolaborasi dalam menghadapi tantangan bagi komoditas kelapa sawit dan perkebunan Indonesia lainnya di pasar global.</p> <p>Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (F-PDIP) serta Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi) GAPKI Satrija B. Wibawa, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadil Hasan dan Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan GAPKI Arief Susanto.</p>	
5.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Bulgaria dilaksanakan pada 1 Agustus 2024.	<p>GKSB DPR RI – Parlemen Bulgaria mengadakan rapat internal di Gedung Nusantara III DPR RI (01/08/2024).</p> <p>Rapat tersebut membahas berbagai hal yang berkaitan dengan upaya memperkuat kerja sama antarpemerintah. Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Bulgaria, H. Alifudin (F-PKS) serta Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Bulgaria Nasyirul Falah Amru (F-PDIP), Mukhtarudin (F-PG), Nurhadi (F-PNasdem) dan Nasril Bahar (F-PAN).</p>	
6.	KSI - BKSAP	Pertemuan Ketua BKSAP dengan UNFPA dilaksanakan pada 8 Agustus 2024.	<p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon menerima kunjungan <i>United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia Representative</i> Mr. Hassan Mohtashami, Kamis (8/8/2024).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas pentingnya kerja sama BKSAP dengan UNFPA dalam merespon berbagai tantangan terkait potensi bonus demografi yang dialami Indonesia, antara lain dalam upaya meningkatkan kualitas <i>human development</i> dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan generasi muda untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.</p> <p>Sementara itu, juga dibahas masalah lain seperti <i>aging society</i> yang terjadi di banyak negara-negara dunia, dan upaya penurunan stunting. Terkait stunting, keduanya sepakat bahwa perlu dilakukan intervensi pada</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>fase awal, yakni melalui pemenuhan gizi wanita, ibu hamil, hingga saat menyusui. Untuk itu, BKSAP DPR RI dan UNFPA berkomitmen untuk bekerja sama dalam merespon berbagai tantangan ini melalui upaya diplomasi parlemen.</p>	
7.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan CDA Korea Selatan dilaksanakan pada 8 Agustus 2024.</p>	<p>Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima <i>Charge d'affaires</i> Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, Mr. Park Soo-deok pada hari Kamis (08/08/2024).</p> <p>Pertemuan membahas upaya peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral antara RI – Korea Selatan. Saat ini hubungan kemitraan kedua negara berada di tingkat <i>Special Strategic Partnership</i>. Status tersebut kiranya dapat menjadi penggerak penguatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, keamanan kawasan, keamanan siber dan keamanan maritim. Dibahas pula potensi kerja sama di bidang agrikultur, dimana Indonesia dan Korea Selatan dapat bertukar pengalaman dan berbagi praktik terbaik dalam inkorporasi teknologi dan kecerdasan buatan dalam peningkatan produksi pertanian.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga sepakat dalam pentingnya peningkatan kerja sama pertahanan dan manufaktur alutista yang memprioritaskan transfer teknologi, keahlian dan pengetahuan antar RI – Korea Selatan.</p>	
8.	KSB - BKSAP	<p>Rapim 46 BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 9 Agustus 2024.</p>	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-46 secara fisik pada hari Jumat (09/08/2024). Turut hadir secara fisik jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Dr. Sukamta (F-PKS).</p> <p>Rapim membahas berbagai rencana kegiatan BKSAP dalam beberapa waktu kedepan khususnya penyelenggaraan <i>Indonesia – Africa Parliamentary Forum</i> dan partisipasi BKSAP dalam berbagai forum parlemen internasional seperti PUIC.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dibahas pula rencana BKSAP untuk menghadiri undangan kunjungan ke Parlemen RRT pada bulan September 2024.	
9.	KSI - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Wamenlu RI dilaksanakan pada 9 Agustus 2024.	<p>Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar rapat persiapan <i>Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024</i> bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha Mansury, di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2023).</p> <p>Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan diplomasi antara Indonesia dan negara-negara Afrika, sekaligus menghidupkan kembali semangat Bandung melalui kemitraan parlemen.</p> <p>Dalam rapat tersebut, Fadli Zon mengungkapkan apresiasinya atas kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri dan jajarannya. Menurutnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama mengingat Afrika kini menjadi arena persaingan baru di antara negara-negara besar dunia.</p> <p>Sukamta juga berharap bahwa jumlah negara yang berpartisipasi bisa mencapai sekitar 12 negara. Forum ini diharapkan menjadi platform yang strategis dalam membangun kemitraan antara Indonesia dan negara-negara Afrika di berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi serta peran aktif pemerintah dan sektor swasta.</p>	
10.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dengan <i>Acting Foreign Minister of Republic of the Sudan</i> dilaksanakan pada 9 Agustus 2024.	<p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menerima kunjungan kehormatan dari Penjabat Menteri Luar Negeri Sudan, Hussein Awad Ali, di Gedung Nusantara III kompleks parlemen Jakarta, Jumat (9/8/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya penyelesaian konflik di Sudan serta memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Sudan.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai untuk mendukung rekonsiliasi damai di Sudan. "Indonesia menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>terkait situasi Sudan dan sejalan dengan posisi komunitas internasional," ujar Fadli Zon.</p> <p>Pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa 10 ton suplai medis senilai US\$ 127.000 pada November 2023 dan 12,44 ton suplai medis senilai US\$ 1 juta pada April 2024. "Kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada Sudan dan berharap otoritas Sudan dapat menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut kepada mereka yang paling membutuhkan," tambahnya.</p> <p>Dalam konteks kerja sama antar-parlemen, Fadli Zon menyatakan penghormatan yang tinggi terhadap upaya memperkuat kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam dimensi parlemen. DPR RI telah membentuk kelompok persahabatan parlemen dengan Sudan yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama saling menguntungkan.</p>	
11.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste dilaksanakan pada 15 Agustus 2024.	<p>Pimpinan BKSAP menerima Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia, H.E. Mr. Dominic Jermey CVO OBE pada hari Kamis (15/08/24).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas upaya penguatan kerja sama bilateral RI – Inggris dalam berbagai bidang, diantaranya dalam peningkatan kerja sama antar-parlemen, keamanan regional, pertahanan, transisi hijau, energi baru terbarukan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan transportasi.</p> <p>Terkait Isu Palestina – Israel, BKSAP DPR RI dan Kedutaan Besar Inggris memandang bahwa <i>two state solution</i> merupakan jalan kedepan bagi kedua pihak dan penting bagi Indonesia dan Inggris untuk mendorong segala pihak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina.</p>	
12.	KSI - BKSAP	<i>Embassy Briefing IAPF</i> dilaksanakan pada 15 Agustus 2024.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan <i>embassy briefing</i> dalam rangka persiapan Sidang <i>Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) 2024</i> , Kamis (15/8/2024).	

Masa Reses V Tahun Sidang 2023-2024
(12 Juli – 15 Agustus 2024)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Sidang yang akan diselenggarakan di Bali 31 Agustus - 2 September 2024 ini sebagai salah satu upaya menguatkan diplomasi DPR RI dengan parlemen negara-negara Afrika.	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Penyelidikan dan Verifikasi tanggal 29 Juli 2024.	Sehubungan dengan adanya pemberitaan di Majalah Tempo edisi 15-21 Juli 2024 dengan judul "Fulus Haji Plus Plus; Kementerian Agama menetapkan kuota haji khusus secara sepihak yang melanggar undang-undang.	
2.	DPRD Kabupaten Banyumas	Menerima audiensi pada 30 Juli 2024.	Penerapan fungsi pengawasan Badan Kehormatan dalam rangka penegakan kode etik DPRD kepada Anggota DPRD.	
3.	DPRD Provinsi Jambi	Menerima audiensi pada 9 Agustus 2024.	Dalam rangka memaksimalkan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD terkait fungsi pengawasan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT. Asuransi Jasindo	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 26-28 Juli 2024 ke Semarang, Jawa Tengah. 2. Tanggal 29 Juli-1 Agustus 2024 ke Batam, Kepulauan Riau. 	<p>Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
2.		<p>Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Penguatan Kelembagaan:</p>	<p>Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri BURT DPR RI untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam rangka penguatan kelembagaan keparlemen dengan beberapa topik bahasan antara lain:</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 2-8 Agustus 2024 ke Baku, Azerbaijan. 2. Tanggal 9-15 Agustus 2024 ke Astana, Kazakhstan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktekan oleh parlemen negara lain. 2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen dengan konstituennya. 3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen. 4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen. 5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. 6. Perencanaan dan implementasi <i>e-parliament</i>. 7. Manajemen sistim pendukung (<i>supporting system</i>) parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif. 	
